PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PERKEBUNAN

RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
(RENJA - PD) PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

0761 - 47153 / 47154
www.disbun.riau.go.id
Jl. Cut Nyak Dien No.06
Pekanbaru

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, menyebutkan bahwa rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,

S. F. HARIYANTO

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 JULI 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 23

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau disusun sebagai pedoman melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu satu tahun anggaran, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) ini dilaksanakan secara simultan / paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi *existing*, evalusi pelaksanaan RENJA tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencaian RENSTRA Perangkat Daerah

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu dalam proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini. Semoga dokumen ini bermanfaat untuk proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	**PENDAHULUAN**		1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Dasar Hukum	5
	1.3	Maksud dan Tujuan	8
	1.4	Sistematika Penulisan	8
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**		14
	2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	14
	2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
	2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
	2.4	Review terhadap Rancangan RKPD	38
	2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	42
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**		46
	3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	46
	3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	48
	3.3	Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan	54
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**		61
BAB V	**PENUTUP**		64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaan Daerah S/D Tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (T-C.29)	15
Tabel	2.2	Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan (T-C.30)	23
Tabel	2.4	Review Terhadap RKPD Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (T-C.31)	40
Tabel	3.2	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025 (T-C.32)	45
Tabel	3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Pembangunan Perkebunan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dan Kabupaten /Kota Tahun 2025 dan Prakiraan Maju tahun 2026 (T-C.33)	60
Tabel	4.1	Rincian Anggaran Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025	63

PENDAHULUAN

BAB I

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Di sisi lain, Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang dalam fungsinya melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dalam rangka pembangunan perkebunan ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan secara integrative dengan dokumen-dokumen perencanaan yang lainnya, mulai dari tingkat pusat dan Provinsi. Hal ini dilakukan agar ada koordinasi dan sinkronisasi berbagai program, serta agar saling mendukung dan menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan.

Sebagaimana dapat dilihat pembangunan pertanian khususnya sub sektor perkebunan secara umum terbukti telah menjadi penggerak perekonomian wilayah, namun dalam pengembangan tanaman perkebunan di Provinsi Riau masih belum optimal. Berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangannya, antara lain permasalahan dari aspek teknis berupa: (1) luas tanam dan luas panen tanaman perkebunan yang semakin menurun akibat bertambahnya tanaman tua dan rusak; (2) rendahnya produktivitas tanaman perkebunan; (3) kondisi sarana dan prasarana belum memadai; (4) penerapan teknologi perkebunan masih rendah; (5) belum tertibnya permasalahan perizinan usaha perkebunan; (6) industri hilir perkebunan dan pemasarannya masih terbatas; dan (7) masih perlunya pendampingan dalam merubah sikap, perilaku dan keterampilan petani serta keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber permodalan dan kapasitas sumberdaya manusia petani yang masih rendah.

Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pembangunan perkebunan masih tetap penting untuk dilanjutkan secara berkesinambungan dalam rangka pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah: 1) potensi sumber daya yang besar dan beragam, 2) banyaknya penduduk yang bergantung pada

sektor ini, 3) peluang pasar yang sangat terbuka, dan 4) berpotensi besar dalam memberikan kontribusi PDRB.

Sejalan dengan semangat reformasi, perencanaan dan penganggaran dasar serta otonomi daerah, Dinas Perkebunan Provinsi Riau dituntut untuk mengubah pola manajemen pembangunan dari pelaksana menjadi fasilitator, akselerator dan pengendali pelaksanaan program pembangunan perkebunan. Program dan kegiatan pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta maupun *stake holders* (pemangku kepentingan) lainnya. Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan mengacu pada RPJMD dan RKPD Provinsi Riau serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau 2025 - 2026. Sebagai bagian dari pembangunan Provinsi Riau, Visi pembangunan pertanian / perkebunan harus selaras dengan visi Provinsi Riau yaitu **"Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)"**, Visi tersebut merupakan cita-cita masyarakat Riau untuk mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing, sejahtera dengan meningkatnya pendapatan dan berkurangnya kemiskinan, bermartabat dan berintegritas serta unggul dan terdepan dalam inovasi, pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2026.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra maka perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025. Dokumen Renja Perangkat Daerah ini disusun dengan maksud untuk mengefektifkan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun 2025 sehingga tujuan pembangunan perkebunan dan tujuan pelayanan publik dapat tercapai.

Adapun bagan alir tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja SKPD Provinsi

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah Tahun 2024 guna merumuskan perencanaan Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 menggunakan landasan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12)
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Riau No 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5)
19. Peraturan Gubernur Riau No 22 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025
    (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22)
20. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

- **MAKSUD**

  Maksud penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam RK Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

- **TUJUAN**

  Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah:

  1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2025 pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau.
  2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
  3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan/sub Kegiatan pembangunan perkebunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan sesuai surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau nomor : 000.7.2.4/BAPPEDALITBANG-I/ tanggal Juli 2024 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2. Dasar Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, dan

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut,dan

2.1.7 Lampiran tabel T-C.29

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

2.2.2 Lampiran tabel T-C.30

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPD Tahun 2025-2026 , terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK,SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

2.3.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah

2.3.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap RKPD

2.4.1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

2.4.2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan

2.4.3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda

2.4.4. Lampiran tabel T-C.31

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

2.5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan ususlan pemangku kepentingan tersebut diperoleh

2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

2.5.3. Lampiran tabel T-C.32

BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tujuan pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

3.3.1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

3.3.2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program , kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya

3.3.3. Lampiran tabel T-C.33

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dari Sistem Aplikasi Kementerian Dalam Negeri, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada tahapan Final RKPD

BAB V. Penutup

5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaanya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan

5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana tindak lanjut

5.4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah serta cap Perangkat Daerah yang bersangkutan

LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025
2. Hasil Verifikasi Dokumen Renja Perangkat Daerah
3. Hasil Pemetaan program dan kegiatan ke Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN 2023

BAB II

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau No 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau. maka terhitung untuk Tahun 2021 terjadi beberapa perubahan dalam susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Dinas Perkebunan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang baru dibentuk. Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan pemisahan dari fungsi pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Dengan proses pemisahan Perangkat Daerah ini maka terjadi penyesuaian pada dokumen perencanaan dan penganggarannya, termasuk didalamnya terjadi perubahan pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan yang merupakan salah satu landasan dalam penyusunan Renja PD.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 16 September 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturam Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Pencapaian Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Riau (berdasarkan Renstra Tahun 2019 – 2024) dapat dilihat pada Tabel.1 (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel T.C. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI***	**Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran**	**100**	**Persen**		100	100	100.00	100	100	100.00
3.27.01.1.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi**	**5**	**laporan**		**1**	**1**	**100.00**	**1**	**1**	**100.00**
3.27.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	412	Orang		103	103	100.00	103	103	100.00
3.27.01.1,03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola**	**28**	**laporan**		**7**	**7**	**100.00**	**7**	**7**	**100.00**
3.27.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	**4**	**laporan**		7	7	100.00	7	4	57.14
3.27.01.1.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Persentase Tingkat Kehadiran ASN**	**1**	**laporan**		**160**	**160**	**100.00**	**160**	**0**	**0.00**
3.27.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	626	Paket		160	160	100.00	-	-	-
3.27.01.1.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi**	**20**	**Jenis layanan**		**5**	**5**	**100.00**	**5**	**5**	**100.00**
3.27.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57	Paket		1	1	100.00	15	8	53.33
3.27.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	173	Paket		1	1	100.00	25	14	56.00
3.27.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		1	1	100.00	3	2	66.67
3.27.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	126	Paket		1	1	100.00	28	17	60.71
3.27.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	725	Laporan		1	1	100.00	180	90	50.00
3.27.01.1.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan**	**192**	**Unit**		**38**	**38**	**100.00**	**25**	**12**	**48.00**
3.27.01.1.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	192	Unit		38	38	100.00	25	12	48.00
3.27.01.1.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi**	**12**	Laporan		**3**	3		**3**	3	100.00
3.27.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1351	Laporan		1	1	100.00	100	50	50.00
3.27.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan		1	1	100.00	12	6	50.00
3.27.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2827	Laporan		1	1	100.00	12	6	50.00

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.1.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**117**	**Unit**		**35**	**35**	100.00	**35**	**16**	**45.71**
3.27.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	41	Unit		13	13	100.00	13	7	53.85
3.27.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53	Unit		15	15	100.00	15	4	26.67
3.27.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	Unit		7	7	100.00	7	5	71.43
							Rata-rata Capaian Kinerja	100.00			49.67
							Predikat Kinerja	Tinggi			Sedang
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah produksi komoditas utama perkebunan***	**8,822,314**	**Ton**		**8,630,387**	**9,227,178**	**106.91**	**-**	**0**	**0.00**
3.27.02.1.01	**Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian**	Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)	75	Ha		75	75	100.00	-	0	
3.27.02.1.01.01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	4	Laporan		1	1	100.00	1	1	0.00
3.27.02.1.02	**Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman**	**Jumlah bibit perkebunan**	**650.750**	**bibit**		**225,000**	**225000**	**100.00**	**225,000**	**225,000**	**100.00**
3.27.02.1.02.01	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih (UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan)	Jumlah Sertifikat Benih	173000	Sertifikat		40,000	40000	100.00	40,000	40000	100.00
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3	laporan		1	1	100.00	1	0	0
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan (UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	3	laporan		1	1	100.00	12,500,000	6,250,000	50
							Rata-rata Capaian Kinerja	100.00			50.00
							Predikat Kinerja	Sangat Tinggi			Sedang
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**12.730**	**kg/ha/th**		**12,609**	**11,932**	**94.63**	**12.730**	**12.730**	**100.00**
3.27.03.1.01	**Penataan Prasarana Pertanian**	**Jumlah luas kebun yang ditanam**	1080	Ha		290	290	100.00	290	0	0.00
3.27.03.1.01.02	Pengendalian dan pemanfaatan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan	100	Dokumen		100	100	100	-	-	-
3.27.03.1.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8	Dokumen		5	5	100.00	7	4	57.14
3.27.03.1.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	11	Dokumen		3	3	100.00	7	4	57.14
3.27.03.1.01.09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	3	laporan		0	0	15.00	1	0	0.00
3.27.03.1.01.10	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya (DAK UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan)	Jumlah gedung UPTD/balai serta sarana pendukungnya yang dibangun dipelihara dan di rehabilitasi	3	Unit		-	-	-	-	-	-
							Rata-rata Capaian Kinerja	78.75			28.57
							Predikat Kinerja	Tinggi			Rendah

Kode	Urusan/Bidang/Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target kinerja capaian program (Renstra PD) s/d Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022	Target dan realisasi kinerja Program dan kegiatan Tahun 2023			Target program dan kegiatan (Renja PD) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun berjalan	
						Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD s/d Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%) s/d Tahun 2023		Realisasi capaian program dan kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**0.3**	**Persen**		**0.1**	**0.15**	**150.00**	**0.3**		
3.27.05.1.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi**	**Luas lahan yang dikendalikan**	**480**	**Ha**		**100**	**100**	**100.00**	**140**	**70**	**50.00**
3.27.05.1.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luas serangan organisme penggangu tumbuhan (OPT) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan yang dikendalikan	480	Ha		100	100	100.00	100	50	50.00
3.27.05.1.01	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah luasan pencegahan penanganan kebakaran lahan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan	400	Ha		0	0	20.00	40	20	0.00
								Rata-rata Capaian Kinerja	60.00		
								Predikat Kinerja	Tinggi		
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**73.81**	**Persen**		**66.95**	**64.53**	**96.39**	**73.81**		
3.27.06.1.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan**	**4**	**laporan**		**1**	1	100.00	**1**	0	0.00
3.27.06.1.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlahizin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4	laporan		1	1	100.00	1	0	0.00
								Rata-rata Capaian Kinerja	100.00		
								Predikat Kinerja	Tinggi		
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**2.15**	**Persen**		**1.78**	**1.81**	**101.69**	**2.15**	**0.00**	0.00
3.27.07.1.01	**Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya**	**140**	**Orang**		**120**	**120**	**100.00**	**140**	**86**	**61.43**
3.27.07.1.01.01	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN	Jumlah penyuluh pertanian ASN yang telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan	20	orang		0	0	0.00	-	-	-
3.27.07.1.01.02	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta	Jumlah penyuluhan pertanian swadaya dan swasta yangt elah mengikuti pengembangan kompetensi	390	orang		120	120	100.00	-	-	-
3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	350	Lembaga		120	120	100.00	120	60	50.00
3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	20	orang		0	0	0.00	50	26	52.00
3.27.07.1.02	**Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi**	**5**	**Kelompok**		**12**	**3**	**25.00**	**4**	**2**	**50.00**
3.27.07.1.02.01	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi Informasi Teknis Sosial ekonomi dan inovasi pertanian	1	Dokumen		0	0	0.00	-	-	-
3.27.07.1.02.02	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah kelompok petani yang mendapat penyuluhan dan pemberdayaan	12	Kelompok		12	3	25.00	4	2	50.00
3.27.07.1.03	**Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan**	**Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen**	**10**	**Unit**		**8**	**8**	100.00	**10**	**6**	**60.00**
3.27.07.1.03.02	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah koorporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	20	Koorporasi		8	8	100.00	10	6	60.00
								Rata-rata Capaian Kinerja	62.50		57.14
								Predikat Kinerja	Sedang		Sedang

Dari tabel 1 (T-C.29) dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023 yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Dengan target 1 laporan Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya, sampai dengan
tahun 2023 terealisasi sebanyak 0 laporan atau sebesar 15,00%

b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Dengan target 40 Ha Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 20,00%

c. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

Dengan target 12 kelompok Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi 3 kelompok atau sebesar 25,00%

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023 yang memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dengan target 1 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dengan target 12 Laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

Dengan target 1 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan target 1 paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dengan target 1 Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dengan target 1 paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

7. Penyediaan bahan logistik kantor

Dengan target 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dengan target 1 Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

9. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Dengan target 7 Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dengan target 7 unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebanyak 7 unit atau sebesar 100,00%

11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dengan target 13 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

12. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Dengan target 15 unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Benih

Dengan target 40.000 Jumlah Sertifikat Benih sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

2. Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian

Dengan target 1 laporan Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

Dengan target 1 laporan Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

Dengan target 5 Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

4. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani

Dengan target 6 Dokumen Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Dengan target 100 Ha Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dikendalikan sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%

e. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

Dengan target 1 laporan Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%.

f. Program Penyuluhan Pertanian

1. Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta

Dengan target 120 orang Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi, sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 100,00%.

5. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani

Dengan target 8 Unit Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi,sampai dengan tahun 2023 terealisasi sebesar 50,00%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan

Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023 tidak ada yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya atau terpenuhinya target kinerja program / kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2023, sebagai berikut :

- Pagu kegiatan yang tersedia di APBD jauh berkurang jika dibandingkan dengan pagu indikatif kegiatan di Renstra sehingga target kinerja sesuai di Renstra menjadi tidak dapat tercapai.
- Adanya perubahan pada satuan standar harga barang dan jasa yang tidak sesuai dengan pagu yang terdapat di Dokumen DPA sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dengan tidak tersedianya anggaran menyebabkan tidak terlaksananya kegiatan tentu saja memberikan implikasi pada capaian program renstra dimana target yang sudah ditetapkan di Renstra tidak dapat tercapai. Dengan tidak tercapainya target maka tujuan dan sasaran strategis dinas juga akan sulit tercapai. Dan secara tidak langsung akan mempengaruhi capaian Visi Misi gubernur.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Agar pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat dilaksanakan sesuai yang telah direncanakan yang tercantum dalam Renstra maka langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang sebagai berikut :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan secara optimal, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi untuk kesejahteraan pekebun;

Strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan kedepan perlu ditekankan, diintensifkan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran. Pemberdayaan pekebun dengan fokus pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah perlu dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan agar terwujud komoditas unggulan daerah yang berkualitas, tangguh dan mampu bersaing dalam era pasar bebas baik pasar global maupun pasar ASEAN. Selain itu aspek penyuluhan akan memegang peranan penting dalam peningkatan kapasitas pengetahuan dan inovasi petani/pekebun.

2. Memperkokoh pondasi sistem pertanian bio-industri berkelanjutan;

Pemenuhan penyediaan bahan baku bioenergi dan pengembangan pondasi sistem pertanian bio-industri dengan fokus pengembangan komoditas kelapa sawit baik melalui kegiatan budidaya dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas maupun melalui kegiatan integrasi tanaman perkebunan dengan ternak dan tumpang sari dengan komoditas pertanian lainnya.

3. Peningkatan kompetensi SDM aparatur / petani

Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia baik aparatur maupun petani sebagai pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi petugas/petani dan kelembagaan guna meningkatkan usaha agribisnis yang bertumpu kepada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha dan kelembagaan agribisnis tanaman perkebunan guna peningkatan budaya usaha tani yang maju dan berkelanjutan

4. Peningkatan kualitas pelayanan internal OPD (bersih, transparan, dan akuntabel)

Strategi peningkatan pelayanan internal OPD yang bersih, transparan dan akuntabel diarahkan pada peningkatan pelayanan publik bidang perkebunan secara akuntabel, profesional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mengoptimalkan pelayanan publik dan partisipasi masyarakat.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Perkebunan selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau yaitu pada Misi ke 3 (Tiga) yaitu **Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing** dan Misi ke 5 (Lima) yaitu **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.**

Adapun tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja perangkat daerah Dinas Perkebunan dapat dilihat dibawah ini :

Tabel.2 (T-C.30)

Tabel pencapaian Kinerja Dinas Perkebunan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	SPM	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke –				**Realisasi Capaian**		**Proyeksi**		**Ctt Analisis**
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah Produksi Utama Perkebunan			8.536.241	8.630.387	8.715.738	8.822.314	8.914.175	8.940.511			
1	Kelapa sawit (ton CPO)	-	-	7.447.941	7.541.787	7.626.838	7.733.114	7.846.071	7.960.391	-	-	-
2	Kelapa (ton Kopra)	-	-	396.400	396.500	396.600	396.700	392.432	388.695	-	-	-
3	Karet (ton karet kering)	-	-	426.500	426.600	426.700	426.800	409.918	324.727	-	-	-
4	Sagu (ton tepung sagu)	-	-	265.400	265.500	265.600	265.700	266.698	272.247	-	-	-
	Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan											
5	Kelapa Sawit (Kg/Ha/Th CPO)	-	-	3.469	3.504	3.539	3.574	1,171	-	-	-	-
6	Kelapa (Kg/Ha/Th Kopra)	-	-	1.415	1.430	1.445	1.460	1,252	-	-	-	-
7	Karet (Kg/Ha/Th Karet Kering)	-	-	1.216	1.220	1.225	1.230	6,340	-	-	-	-
8	Sagu (Kg/Ha/Th Tepung Sagu)			6.390	6.395	6.400	6.405	0	-			
9	Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	0.01	1.78	1.96	2.15	0	1.81	-	-	-

2.2.1 Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun IKK

Dari tabel.2 (T-C.30) yaitu tabel pencapaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan diatas dapat dianalisa sebagai berikut:

❖ Capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2023 sebesar 10.266.269 ton CPO atau capaian kinerjanya 134,60% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa sawit tahun 2022 yaitu sebesar 7.960.391 ton CPO atau capaian kinerja sebesar 105.55%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan luas areal kelapa sawit dari hasil perhitungan tutupan lahan (*citra landsat*) Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 1 di bawah ini :

Grafik 1
Perkembangan Produksi Kelapa Sawit
Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa sawit dalam 5 tahun cenderung naik, penurunan produksi pada tahun 2020 disebabkan kebun kelapa sawit yang kurang

produktif lagi karena tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau banyak yang sudah tua dan perlu adanya peremajaan, sampai dengan Tahun 2022 jumlah TTR tanaman kelapa sawit sebanyak 67.855 (*Statistik Angka Tetap Tahun 2022*)

- Capaian realisasi produksi kelapa tahun 2023 sebesar 408.130 ton kopra atau capaian kinerjanya 102,91% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi kelapa tahun 2022 yaitu sebesar 388.695 ton kopra, namun demikian produksi masih relatif stabil, hampir sama dengan produksi tahun lalu, kenaikan produksi yang signifikan terjadi pada tahun 2020 sebesar 396.170 ton kopra. Perkembangan Capaian realisasi produksi kelapa dapat dilihat pada grafik 2 di bawah ini

Grafik 2
Perkembangan Produksi Kelapa
Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi kelapa cenderung fluktuatif, namun pada tahun 2023 luas tanaman kelapa bertambah sebesar 19.435 ha dari tahun 2022. Peningkatan produksi disebabkan penambahan luas lahan kelapa.

- Capaian realisasi produksi karet tahun 2023 sebesar 315.507 ton karet kering atau capaian kinerjanya 73,94% lebih

rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produksi karet tahun 2022 yaitu sebesar 324.727 ton karet kering. Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

Perkembangan Capaian realisasi produksi karet dapat dilihat pada grafik 3 di bawah ini :

Grafik 3

Perkembangan Produksi Karet

Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produksi karet cenderung mengalami penurunan produksi karena luas areal jauh berkurang karena banyaknya terjadi alih komoditi menjadi kelapa sawit dan juga alih fungsi lahan.

❖ Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit tahun 2022 sebesar 3,526 ton CPO atau capaian kinerjanya 99,63% lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian realisasi produktivitas tahun 2021 yaitu sebesar 3,721 ton CPO atau capaian kinerjanya 106,19%, hal ini disebabkan karena mahalnya harga saprodi (pupuk) sehingga perkebunan kelapa sawit rakyat kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknisnya sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun selain itu banyaknya tanaman tua rusak (TTR) dimana sampai dengan Tahun 2022 jumlah TTR

tanaman kelapa sawit sebanyak 67.855 (*Statistik Angka Tetap Tahun 2022*), hal ini menyebabkan berkurangnya produktivitas tanaman kelapa sawit di Provinsi Riau. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas kelapa sawit dapat dilihat pada grafik 4 di bawah ini :

Grafik 4
Perkembangan Produktivitas Kelapa Sawit
Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa capaian realisasi produktivitas kelapa sawit tahun 2021 sebesar 3.721 kg/ha/th atau capaian kinerja 106.19% atau telah melampaui target yaitu sebesar 3.504 kg/ha/th ,dibandingkan dengan capaian tahun 2022 realisasi produktivitas mengalami kenaikan , hal ini disebabkan mahalnya harga saprodi yang menjadi faktor pendukung tingginya produktivitas tanaman rakyat, sehingga kurang mendapat pemeliharaan sesuai teknis yang dianjurkan sehingga produktivitas perkebunan rakyat menurun dan banyak dalam kategori tanaman tua rusak dan perlu adanya peremajaan sehingga produktivitasnya dapat meningkat kembali.

❖ Capaian produktivitas tanaman kelapa Tahun 2022 sebesar

1.020 kg/h/th dan dikategorikan rendah atau mencapai 70,58%. Hal ini disebabkan karena petani tidak melakukan pemeliharaan sesuai teknis dan banyak tanaman kelapa di Provinsi Riau dalam kategori Tanaman Tua Rusak.

Perkembangan Capaian realisasi produktivitas tanaman kelapa dapat dilihat pada grafik 5 di bawah ini :

Grafik 5

Perkembangan Produktivitas Kelapa

Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas kelapa berfluktuatif, pada tahun 2019 produktvitas kelapa mengalami kenaikan namun pada tahun 2020 produktivitas kelapa terjadi penurunan, ini berarti pada tahun 2020 dimana terjadinya pandemi covid-19 petani kelapa melakukan pemeliharaan dan perawatan kebunnya untuk menopang pendapatan keluarga.

❖ Capaian realisasi produktivitas karet tahun 2022 sebesar 1.299 kg/ha/th karet kering atau capaian kinerjanya 106.04% lebih tinggi jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2021 yaitu sebesar 1.231 kg/ha/th karet kering, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi akibat perubahan cuaca/klim yang baik sehingga produksi meningkat.

Perkembangan Capaian realisasi produktifitas karet dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 6

Perkembangan Produktivitas Karet

Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas karet cenderung menaik karena terpeliharanya kebun karet rakyat dengan baik

❖ Capaian realisasi produktivitas sagu tahun 2022 sebesar 6,390 kg/ha/th tepung sagu atau capaian kinerjanya 100,15% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2021 yaitu sebesar 6,345 kg/ha/th tepung sagu, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan produksi. Selain itu capaian produktivitas tanaman sagu tidak dapat dibandingkan dengan produktivitas tahun 2020 karena produktivitas tanaman sagu pada tahun 2020 tidak ada target kinerjanya sehingga tidak dapat dibandingkan. Perkembangan Capaian realisasi produktivitas sagu dapat dilihat pada grafik 6 di bawah ini :

Grafik 7

Perkembangan Produktivitas Sagu

Tahun 2018 s/d 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa perkembangan produktivitas sagu terjadi peningkatan mulai dari tahun 2018 menurun karena banyaknya tanaman tua rusak dan tidak terpelihara dengan baik

❖ Untuk Capaian Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditingkatkan kompetensinya Dinas Perkebunan provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 1.81 % yang didukung oleh kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian, kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Riau. Peran strategis tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan modal, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber

pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian Riau yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau, mempercepat pertumbuhan ekonomi; mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, memunculkan daerah pusat-pusat pertumbuhan baru di desa-desa pelosok, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pada beberapa tahun terakhir ini pertumbuhan dan perkembangan sektor pertanian di Provinsi Riau berjalan dengan cukup pesat.

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan sub sektor perkebunan di Provinsi Riau, sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor : 61 Tahun 2021 maka Dinas Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah pada urusan perkebunan, dengan melakukan pelayanan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pleaksanaan evaluasi dan pelaporan

Agar pelaksanaan urusan perkebunan yang diemban oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau dapat mendukung misi Pemerintah Daerah, diperlukan koordinasi dan sinergi program dan kegiatan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan kabupaten/kota se-provinsi Riau yang membidangi perkebunan dengan melakukan kerjasama, koordinasi, sinkronisasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan serta melakukan perumusan kebijakan dan melaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan masih banyak ditemui permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau perlu ditentukan faktor-faktor yang mempengaruhi yang dijadikan isu strategis Dinas Perkebunan. Adapun Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perkebunan berdasarkan hasil analisis dari aspek gambaran pelayanan dan kajian terhadap Renstra K/L, RTRW dan KLHS yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut:

a. Faktor internal

Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa kekuatan dan kelemahan. Dengan mencermati gambaran pelayanan Dinas Perkebunan, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Kekuatan (strenghts):

1. Tersedianya Sumberdaya manusia;
2. Tersedianya sumberdaya lahan;
3. Tersedianya teknologi (Informasi, budidaya, perlindungan, perbenihan dan sarana produksi);
4. Tersedianya komoditas tanaman perkebunan untuk pemenuhan pangan dan industri;
5. Tersedianya peraturan/per Undang-undangan;
6. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, kebijakan.

Kelemahan (weakness):

1. Penerapan teknologi budidaya tanaman yang belum optimal;
2. Infrastruktur, prasarana dan sarana perkebunan yang belum memadai;
3. Penanganan pasca panen, pembinaan mutu, pemasaran hasil perkebunan yang belum optimal;
4. Pengendalian Organisme Penyakit Tanaman (OPT) dan penanganan gangguan usaha dan kebakaran lahan yang belum menjangkau seluruh wilayah;
5. Masih terbatasnya pelaksanaan sertifikasi & pengawasan mutu benih

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi organisasi dalam melakukan pelayanan berupa peluang dan tantangan. Dengan mencermati dinamika lingkungan strategis baik nasional maupun internasional, maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

Peluang (opportunities):

1. Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
2. Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri;
3. Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
4. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan;
5. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah.

Tantangan (threats):

1. Produksi/produktivitas tanaman perkebunan masih rendah;
2. Alih fungsi lahan setiap tahun terus meningkat;
3. Pengusaan teknologi pertanian masih rendah;
4. Isu lingkungan hidup dan globalisasi;
5. Daya saing produk olahan pertanian serta pemasaran masih terbatas;
6. Kontribusi sektor pertanian terhadap peningkatan pendapatan petani belum maksimal
7. Akses petani terhadap permodalan masih terbatas.

Permasalahan dan hambatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, bila program dan kegiatan yang diemban Dinas Perkebunan Provinsi Riau tidak dapat terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan Dinas Perkebunan mendukung terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing.

Dinas Perkebunan mempunyai peran dalam mewujudkan pembangunan perkebunan dalam pencapaian masyarakat

sejahtera dan berdaya saing melalui peningkatan Nilai Tambah Usaha Perkebunan (NTUP) , menurunnya emisi gas rumah kaca, peningkatan ketahanan pangan daerah, peningkatan investasi daerah, dan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

- Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Kinerja pembangunan perkebunan secara nasional selama 3 tahun terakhir menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Indikator ekonomi makro seperti pendapatan domestik bruto, neraca perdagangan, dan penyerapan tenaga kerja rakyat menunjukkan trend positif.

Rencana tata ruang wilayah merupakan produk perencanaan yang digunakan sebagai pedoman didalam melaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang disesuaikan dengan potensi wilayah maka arahan pengembangan tanaman perkebunan untuk pembangunan tahun ke depan lebih difokuskan pada optimasi penggunaan lahan dan memanfaatkan inovasi teknologi.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan masih diperlukan sinergi terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) agar kebijakan pembangunan perkebunan menjadi salah satu ujung tombak penciptaan green economy yang tentu selaras dengan isu-isu lingkungan hidup. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan atau instrumen pengelolaan lingkungan lainnya, menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang

strategis dan partisipatif, kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan.

Dalam KLHS terdapat 6 aspek kajian, yaitu:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam (SDA);
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
6. Tingkat ketahanan dan potensi keragaman hayati.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan tanaman perkebunan terkait dengan 6 aspek tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Karekteristik lahan, kondisi fisik kimia tanah, ketersediaan dan suplai air, aspek topografi, geomorfologi, pola hidrologi maupun aksesibilitas menjadi faktor yang perlu diperhitungkan untuk merancang kawasan.
2. Penanganan budidaya dan produksi serta tata kelola teknologi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
3. Penanganan pasca panen dan aplikasi teknologi pasca panen yang ramah lingkungan jika tidak diterapkan akan berdampak pada menurunnya mutu, rendahnya nilai jual, turunnya nilai kompetitif
4. Layanan pengaturan ekosistem melalui optimalisasi pemanfaatan lahan dan pengaturan pola tanam
5. Layanan kultural melalui aplikasi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola SDA
6. Penggunaan lahan sesuai dengan jenis peruntukan lahan, potensi SDA yang tersedia dan SDM yang terlibat
7. Efisiensi dalam pengadaan produk pendukung (pupuk, pestisida, benih), teknologi infrastruktur pendukung

(alat/mekanisasi), SDA pendukung (air, media tanah) yang akan diterapkan

8. Pemanfaatan lahan untuk kegiatan perkebunan akan membentuk ekosistem buatan, terjadinya perubahan ekosistem alami secara terus menerus berdampak pada meningkatnya kerentanan ekosistem, dan kondisi ini mempengaruhi tingkat adaptasi terhadap perubahan iklim.

9. Pola budidaya monokultur ditinjau dari aspek keseimbangan ekosistem akan mengancam keanekaragaman hayati.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan Dinas Perkebunan berbagai tantangan dan peluang sebagai berikut :

❖ Tantangan

a) Semakin tingginya alih fungsi lahan
b) Menurunnya kesuburan tanah pertanian
c) Kondisi jaringan irigasi tidak memadai
d) Anomali Iklim
e) Mahalnya agro input (sarana produksi dan alat pertanian)
f) Terbatasnya modal petani
g) Penerapan teknologi terbatas
h) Daya saing produksi masih rendah
i) Tingkat kehilangan hasil masih tinggi
j) Produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang masih rendah
k) Kurangnya infrastruktur, sarana dan prasarana produksi
l) Isu lingkungan hidup dan globalisasi
m) Kesejahteraan petani/pekebun masih rendah (NTP < 100)

❖ Peluang

a) Tersedianya SDA (Sumber Daya Alam), SDM (Sumber Daya Manusia), SDB (Sumber Daya Buatan) dalam pengembangan agribisnis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

b) Posisi wilayah Riau yang strategis dalam menjangkau daerah-daerah pemasaran baik nasional dan internasional

c) Pengembangan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terbuka luas

d) Pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik di Provinsi Riau

e) Kebijakan pemerintah yang sangat mendukung

f) Banyaknya sektor swasta tumbuh dan berkembang di Provinsi Riau

g) Infrastruktur (jalan, jembatan, listrik, komunikasi) semakin baik

h) Potensi sumberdaya perkebunan masih dapat ditingkatkan untuk pengembangan industri hilir (bioindustri dan bioenergi)

i) Meningkatnya permintaan pasar domestik dan luar negeri

j) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif

k) Meningkatnya kebutuhan terhadap bahan pangan

l) Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim sudah menjadi komitmen pemerintah

Dari isu-isu strategis baik faktor internal maupun faktor eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau maka isu-isu penting yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2025 adalah melakukan peningkatan produksi /produktivitas tanaman perkebunan dengan melaksanakan program peningkatan mutu, produksi dan produktivitas hasil perkebunan dengan melakukan kegiatan intensifikasi, diversifikasi, peremajaan dan pembangunan tanaman perkebunan dan pembinaan mutu hasil dengan melaksanakan

pengendalian hama penyakit (OPT), normalisasi saluran drainase serta penatausahaan perizinan usaha perkebunan

Selain itu juga melakukan peningkatan pemberdayaan kelembagaan penyuluh perkebunan dengan melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pengawasan penyuluh perkebunan

2.4. Review Terhadap RKPD

Review terhadap RKPD merupakan proses membandingkan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Tahun 2025 dengan hasil pencermatan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau dengan analisis kebutuhan perencanaan perkebunan.

Review terhadap RKPD dilakukan untuk penyempurnaan dan penyesuaian terhadap kebutuhan rencana program/kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2025 yang dibahas bersama dengan Badan Pembangunan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Provinsi Riau

Dengan terbitnya hasil pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019, Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pencermatan kembali bersama Tim TAPD dalam hal ini Bappedalitbang Provinsi Riau Bidang II melakukan penyesuaian hasil pemetaan yang telah dilakukan sebelumnya dengan hasil pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019. Kegiatan ini disebut dengan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019.

Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan ditegaskan lagi oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, maka setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia harus melakukan pemetaan program kegiatan tahun 2021 disesuaikan dengan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Permendagri No. 90 Tahun 2019

Selanjutnya dilakukan pemetaan pemutahiran program dan kegiatan sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pemetaan pemutakhiran program dan kegiatan Renstra. Semua proses pemutakhiran ini dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) yang dientry alamat web *https://sipd-ri.kemendagri.go.id/*

Review pada rencana kerja dan hasil analisis kebutuhan perangkat daerah terjadi disebabkan antara lain karena pergeseran anggaran, penyesuaian dalam pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan, penyesuaian anggaran dalam rekening belanja barang dan jasa belanja perjalanan dinas, belanja modal dan belanja hibah barang dan jasa kepada pihak ketiga/masyarakat dan adanya masukan usulan dari DPRD.

Adapun pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025 yaitu tabel 3 (Tabel T-C.31) Review terhadap RKPD Dinas Perkebunan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel T.C. 31
REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Unit Organisasi : Dinas Perkebunan

Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
3	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**	**100 Persen**	**24,141,476,532**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**	**100 Persen**	**24,141,476,532**
3	27	01	1			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	165,000,000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	165,000,000
3	27	01	1	1	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen	165,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen	165,000,000
3	**27**	**01**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)	*103 Orang*	*17,052,660,759*	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)	*103 Orang*	*17,052,660,759*
3	27	01	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103 Orang/Bulan	17,052,660,759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103 Orang/Bulan	17,052,660,759
3	**27**	**01**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	*7 Laporan*	*70,801,500*	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	*7 Laporan*	*70,801,500*
3	27	01	1	3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7 Laporan	70,801,500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7 Laporan	70,801,500
3	**27**	**01**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	*100 persen*	*72,100,000*	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	*100 persen*	*72,100,000*
3	27	01	1	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket	72,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	103 Paket	72,100,000
3	**27**	**01**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	*5 Jenis*	*3,022,551,059*	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	*5 Jenis*	*3,022,551,059*
3	27	01	1	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	266,907,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	266,907,500
3	27	01	1	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	679,485,858	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	679,485,858
3	27	01	1	6	0004	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	302,293,335	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	302,293,335
3	27	01	1	6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	169,355,183	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	169,355,183
3	27	01	1	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	1,604,509,183	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	260 Laporan	1,604,509,183
3	**27**	**01**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	*28 Unit*	*347,300,000*	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	*28 Unit*	*347,300,000*
3	27	01	1	7	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	347,300,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	347,300,000
3	**27**	**01**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah	*3 Laporan*	*2,523,034,829*	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah	*3 Laporan*	*2,523,034,829*
3	27	01	1	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,750,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	13,750,000
3	27	01	1	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	489,280,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	489,280,000
3	27	01	1	8	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	924 Laporan	2,020,004,829	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	924 Laporan	2,020,004,829
3	**27**	**01**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	*35 Unit*	*888,028,385*	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	*35 Unit*	*888,028,385*
3	27	01	1	9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	546,300,885	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	546,300,885

Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
3	27	01	1	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	65,670,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	65,670,000
3	27	01	1	9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	276,057,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	276,057,500
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**	**11.256.369 Ton**	**7,771,105,394**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**	**11.256.369 Ton**	**7,771,105,394**
3	**27**	**02**	**1**			***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***		***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***	***75 Ha***	***1,861,188,254***	***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***		***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***	***75 Ha***	***1,861,188,254***
3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0	0	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	0	0
3	27	02	1	01	0003	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	1 Laporan	1,461,188,254	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	1 Laporan	1,461,188,254
3	27	02	1	01	0005	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan	1 Laporan	400,000,000	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan	1 Laporan	400,000,000
3	**27**	**02**	**1**	**02**		***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***		***Jumlah bibit perkebunan***	***147.750 Bibit***	***5,909,917,140***	***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***		***Jumlah bibit perkebunan***	***147.750 Bibit***	***5,909,917,140***
3	27	02	1	02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih	40.000 Sertifikat	150,000,000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih	40.000 Sertifikat	150,000,000
3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	3,067,917,140	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	3,067,917,140
3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	2,692,000,000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	2,692,000,000
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**12.79 Kg/ha**	**7,786,200,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**12.79 Kg/ha**	**7,786,200,000**
3	**27**	**03**	**1**	**01**		***Penataan Prasarana Pertanian***		***Jumlah luas kebun yang ditanam***	***550 Ha***	*7,786,200,000*	***Penataan Prasarana Pertanian***		***Jumlah luas kebun yang ditanam***	***550 Ha***	*7,786,200,000*
3	27	03	1	01	0001	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	1 Dokumen	100,000,000	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	1 Dokumen	100,000,000
3	27	03	1	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8 Dokumen	4,070,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	6 Dokumen	4,070,000,000
3	27	03	1	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	6 Dokumen	2,006,200,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	6 Dokumen	2,006,200,000
3	27	03	1	01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1,460,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	1,460,000,000
3	27	03	1	01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	50,000,000
3	27	03	1	01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	100,000,000	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	100,000,000
3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**0,40 Persen**	**879,999,940**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**0,40 Persen**	**879,999,940**
3	**27**	**05**	**1**	**01**		***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***		***Luas lahan yang dikendalikan***	***100 Ha***	*879,999,940*	***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***		***Luas lahan yang dikendalikan***	***100 Ha***	*879,999,940*
3	27	05	1	01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	275,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	275,000,000

Kode						RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
						3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	12
3	27	05	1	01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	604,999,940	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	604,999,940
3	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**76,81 Persen**	**400,000,000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**76,81 Persen**	**400,000,000**
3	27	06	1	01		***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***	***13 perusahaan***	400,000,000	***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***	***13 perusahaan***	400,000,000
3	27	06	1	01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	400,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	400,000,000
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**2,34 Persen**	**798,733,231**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**2,34 Persen**	**798,733,231**
3	**27**	**07**	**1**			***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***	***80 Orang***	***224,999,885***	***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***	***80 Orang***	***224,999,885***
3	27	07	1	01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	224,999,885	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	224,999,885
3	27	07	1	01	02	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	0	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi	0	0
3	27	07	1	02		***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***	*2 Kelompok*	*414,999,876*	***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***	*2 Kelompok*	*414,999,876*
3	27	07	1	02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	164,999,876	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	164,999,876
3	27	07	1	02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 kelompok	250,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 kelompok	250,000,000
3	**27**	**07**	**1**	**03**		***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***		***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***	***2 Unit***	*158,733,470*	***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***		***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***	***2 Unit***	*158,733,470*
3	27	07	1	03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 Unit	158,733,470	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 Unit	158,733,470
										41,777,515,097					**41,777,515,097**

Dari tabel 3 (Tabel T-C.31) diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Pendanaan indikatif pembangunan perkebunan yang ada pada RKPD dengan analisis kebutuhan pendanaan yang telah direncanakan secara bersama dengan Bappedalitbang sesuai dengan yang telah direncanakan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025, dan usulan dari DPRD Provinsi Riau
- Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025 memiliki total anggaran sebesar Rp 41.777.515.097,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri yang terdiri atas

✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 24.141.476.532,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 4.929.105.394 ; (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

✓ Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 7.786.200.000 ,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

✓ Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 879.999.940,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

✓ Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

✓ Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 798.733.231; (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

- Adapun rincian anggaran untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan, akan diinput pada aplikasi *https://sipd-ri.kemendagri.go.id* Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, penyusunan usulan program dan kegiatan masyarakat ini berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJMD Provinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan tahun 2025, agar didalam pelaksanaan program / kegiatan terwujud sinergis dengan dokumen perencanaan.

Dalam memperoleh usulan program dan kegiatan masyarakat tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Riau melakukan pertemuan Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau merupakan sinkronisasi pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Forum Perangkat Daerah ini merupakan wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat, dan dunia usaha (pemangku kepentingan), serta wahana antar pihak-pihak lain yang langsung atau tidak langsung guna penyusunan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Riau untuk penyempurnaan Rencana Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Riau sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Riau tahun 2025.

Forum Perangkat Daerah adalah tahapan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum yang sangat penting guna menciptakan kesamaan pandangan dan harapan dari seluruh pelaku pembangunan dalam memadukan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan tersebut telah diakomodasi didalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Provinsi Riau yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian sub sektor perkebunan dan masih mengandalkan sub sektor ini sebagai penopang perekonomian daerah, sudah barang tentu sangat mendukung dan berkepentingan dalam forum ini sebagai media untuk memfasilitasi dan mengakomodasikan kemampuan dan keperluan Kabupaten/Kota dan Provinsi, khususnya dalam mempersiapkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka memantapkan Pembangunan perkebunan guna mendukung visi dan misi Gubernur Riau.

Pertemuan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 tersebut merupakan sarana mengintegrasikan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan di daerah. Hasil pembahasan Forum Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2024 dirumuskan dalam satu berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Pertemuan Forum Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi bahan pemutakhiran rancangan RKPD Provinsi Riau dan bahan pemutakhiran pada Musrengbang RKPD Provinsi Riau tahun

2024. Berikut ini disajikan tabel 4 (TC.32) yaitu tabel usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025.

TABEL 4 (T-C.32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH				
A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**	**100 Persen**	Usulan bagi Kabupaten/Kota untuk dapat mencermati hal sebagai berikut :
A.1	**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	14 Dokumen	* Lokasi dipastikan tidak termasuk
A..1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah	14 Dokumen	* Lokasi harus disertai titik Koordinat
A.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)	*103 Orang*	* Kelompok tani terdaftar di SIMLUHTAN
A.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	103 Orang/Bulan	
A.3	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	*7 Laporan*	
A.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7 Laporan	
A.4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Persentase Tingkat Kehadiran ASN	*100 persen*	
A.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	154 Paket	
A.5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	*5 Jenis*	
1..5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	15 Paket	
1..5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	
1..5.3	Penyediaan bahan logistik kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	
1..5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28 Paket	
1..5.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125 Laporan	
A.6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	*28 Unit*	
A.6.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	28 Unit	
A.7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah	*3 Laporan*	
A.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	
A.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	
A.7.3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	924 Laporan	
A.8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	*35 Unit*	
A.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	
A.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	
A.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit	
B.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**	**11.256.369 Ton**	
B.1	***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***		***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***	***75 Ha***	
B.1.2	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	1 Laporan	
B.1.3	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan		Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan	1 Laporan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	CATATAN PENTING
1	2	3	4	5	6
B.2	***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***		***Jumlah bibit perkebunan***	***147.750 Bibit***	
B.2.1	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		Jumlah Sertifikat Benih	40.000 Sertifikat	
B.2.2	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	
B.2.3	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)		Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan	
C.	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**12.79 Kg/ha**	
C.1	***Penataan Prasarana Pertanian***		***Jumlah luas kebun yang ditanam***	***550 Ha***	
C.1.1	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	1 Dokumen	
C.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	8 Dokumen	
C.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	6 Dokumen	
C.1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	
C.1.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	1 Unit	
C.1.6	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	200 Ha	
D.	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**0,40 Persen**	
D.1	***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***		***Luas lahan yang dikendalikan***	***100 Ha***	
D.1.1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	200 Ha	
D.1.2	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	50 Ha	
E.	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**76,81 Persen**	
E.1	***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***	***13 perusahaan***	
E.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	12 Laporan	
F.	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**2,34 Persen**	
F.1	***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***	***80 Orang***	
F.1.1	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	50 orang	
F.2	***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***		***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***	*2 Kelompok*	
F.2.1	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen	
F.2.2	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	6 kelompok	
F.3	***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***		***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***	***2 Unit***	
F.3.1	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	2 Unit	

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan harus memperhatikan permasalahan yang menjadi lingkup nasional maupun amanat pembangunan yang diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pencapaian Visi "**TERWUJUDNYA INDONESIA BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG "**"

Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia** yang terampil menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan dinamis
2. **Pembangunan Infrastruktur,** yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi yang mempermudah akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, serta mengakselerasi nilai tambah perekonomian

3. **Menyederhanakan Regulasi,** yang menjadi kendala perubahan untuk kemajuan, utamanya dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengoptimalkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. **Menyederhanakan Birokrasi,** melalui pemangkasan proses yang panjang untuk mempermudah investasi
5. **Transformasi Ekonomi,** dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi negara yang memiliki daya saing manufaktur dan jasa modern, yang mempunyai nilai tambah bagi kemakmuran bangsa

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi Ekonomi. Ada 5 pilar dalam tranformasi Ekonomi Indonesia yaitu (1) optimalisasi pembangunan infrastruktur, (2) penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi, (3) minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, (4) efisiensi pasar tenaga kerja dan peningkatan kualitas SDM, serta (5) konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan.

Kelima pilar yang dibangun saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan membentuk fondasi pembangunan yang berkelanjutan sebagai landasan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju 2024. Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur berfokus pada upaya mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur, Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit, Ketiga, Indonesia perlu meminimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek dalam rangka mengatasi saving-investment gap, Keempat, pasar tenaga kerja perlu diefisienkan dan ditingkatkan SDM-nya, Kelima investasi yang masuk perlu dikonfigurasi untuk mendukung

pertumbuhan dan memangkas Incremental Capital-Output Ratio (ICOR).

Telaahan terhadap kebijakan nasional khususnya pembangunan Perkebunan Provinsi Riau diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional yaitu Transformasi Ekonomi pada pilar Kedua, implementasi pemerataan ekonomi antara lain dilakukan dengan reformasi agraria yang terdiri dari Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), perhutanan sosial, dan moratorium serta peremajaan perkebunan kelapa sawit. Bila ditelaah Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2024 dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2024 terdapat keselarasan antara program dan kegiatan di Renja Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI dengan Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai daerah dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur pada suatu indikator beserta targetnya. Oleh akrena itu sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang dilakukan selama 2 (dua) tahun sampai tahun 2026.

- Tujuan ke -5 : Mewujudkan Perekonomian yang berdaya saing dan inklusif

  Sasarannya : Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunkan kesenjangan pendapatan

- Tujuan ke -6 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

  Sasarannya : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang digital yang lincah kolaboratif, dan akuntabel

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau sebagai berikut :

- Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan Provinsi Riau serta tugas pokok dan fungsi maka tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Meningkatnya pendapatan petani perkebunan melalui peningkatan NTUP
2. Meningkatnya kinerja OPD Dinas Perkebunan melalui peningkatan nilai SAKIP

- Sasaran

Dengan mengacu tujuan maka sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah :

1. Terwujudnya peningkatan produksi perkebunan berkelanjutan melalui :
   a. Peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian sub sektor perkebunan
   b. Peningkatan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian sub sektor perkebunan
   c. Peningkatan perizinan usaha pertanian sub sektor perkebunan
   d. Peningkatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sub sektor perkebunan
   e. Peningkatan penyuluhan pertanian sub sektor perkebunan
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel.

3. Dalam rangka mewujudkan visi melalui misi yang telah ditetapkan sebagaimana yang telah diuraikan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Berikut dapat dilihat Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Tahun 2025-2026 dan tujuan dan sasaran program Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2026 seperti pada tabel.5 berikut :

Tabel. 5
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)	
				2025	2026
1	Meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan dengan rincian sbb :	11.256.369	11.257.669
			- *Kelapa Sawit(ton CPO)*	*10.277.769*	*10.278.769*
			- *Kelapa (ton kopra)*	*369.800*	*396.900*
			- *Karet (ton karet kering)*	*316.000*	*316.100*
			- *Sagu (ton tepung sagu)*	*265.800*	*265.900*

Adapun tujuan dan sasaran Program Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6 berikut :

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN (TAHUN)	
				2025	2026
1	Meningkatkan pendapatan petani perkebunan	Meningkatnya sarana produksi pengembangan perkebunan	Jumlah produksi komoditas utama perkebunan dengan rincian sbb :	11.256.369	11.257.669
			- *Kelapa Sawit(ton CPO)*	*10.277.769*	*10.278.769*
			- *Kelapa (ton kopra)*	*369.800*	*396.900*
			- *Karet (ton karet kering)*	*316.000*	*316.100*
			- *Sagu (ton tepung sagu)*	*265.800*	*265.900*
		Meningkatnya prasarana produksi pengembangan perkebunan	Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan dengan rincian sbb :	11.256.369	11.257.669
			- *Kelapa Sawit(kg/ha/th CPO)*	*10.277.769*	*10.278.769*
			- *Kelapa (kg/ha/th kopra)*	*369.800*	*396.900*
			- *Karet (kg/ha/th karet kering)*	*316.000*	*316.100*
			- *Sagu (kg/ha/th tepung sagu)*	*265.800*	*265.900*
		Meningkatnya perizinan usaha perkebunan	Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin	76,81 %	79,81 %
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	*Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terkena dampak bencana*	*0,4 %*	*0,5 %*
		Meningkatnya kompetensi SDM perkebunan	*Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya*	*2,34 %*	*2,53 %*
2.	Terwujudnya peningkatan kinerja OPD	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih transparan dan akuntabel	*Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD*	*72,5 (BB)*	*74,5 (BB)*

Untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan indikator kinerja sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

I. Terwujudnya peningkatan kinerja OPD

- Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel

  - Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD
    Formulasi Perhitungan : Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD

II. Meningkatkan pendapatan petani tanaman perkebunan

- Meningkatnya sarana produksi pengembangan perkebunan

  - Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan.
    Formulasi Perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan tahun berkenaan

- Meningkatnya Prasarana produksi pengembangan perkebunan
  - Jumlah produktivitas komoditas utama tanaman perkebunan
    Formulasi Perhitungan : Jumlah produksi komoditas utama tanaman perkebunan tahun berkenaan dibagi denga luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaaan

- Meningkatnya perizinan usaha perkebunan

  - Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin
    Formulasi Perhitungan : Total luas data IUP Stratnas PK (Pengendalian Korupsi) dibagi dengan total luas kebun kelapa sawit data Statistik perkebunan dikali seratus

- Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan

  - Persentase luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana

Formulasi Perhitungan : Luas lahan perkebunan yang dikendalikan dibagi dengan luas lahan yang terkena bencana pada tahun berkenaan dikali seratus

- Meningkatnya Kompetensi SDM perkebunan
  - Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya
    Formulasi Perhitungan : Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sampai dengan tahun berkenaan dibagi jumlah petani perkebunan yang ada dalam simluhtan dikali seratus

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan peningkatan kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan sub sektor perkebunan, Dinas Perkebunan sesuai hasil analisa terhadap potensi, permasalahan, peluang dan tantangan dalam pembangunan perkebunan di Provinsi Riau serta memperhatikan RPJPD dan RPJMD Provinsi Riau, maka Dinas Perkebunan Provinsi Riau telah melakukan pemetaan program kegiatan dan sub kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program kegiatan dan sub kegiatan, sesuai RENSTRA Dinas Perkebunan Tahun 2019-2024 dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Program Bidang Pertanian sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 khusus untuk perkebunan sebagai berikut :
  - Program penunjang urusan pemerintahan, 8 kegiatan dengan 16 sub kegiatan, yaitu :
    1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

   Sub Kegiatan :

   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
   c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- Program Urusan terdapat 5 program, 8 kegiatan dan 17 sub kegiatan yaitu :

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian

   Sub Kegiatan :

   a. Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan
   b. Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan

2. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman

   Sub Kegiatan :

   a. Pengawasan Mutu , Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan

B. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

1. Penataan Prasarana Pertanian

   Sub Kegiatan :

   a. Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
   b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani

c. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
d. Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
e. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya
f. Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian

C. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

1. Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi

Sub Kegiatan :

a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
b. Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

D. Program Perizinan Usaha Pertanian

1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian

E. Program Penyuluhan Pertanian

1. Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian

2. Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian

Sub Kegiatan :

a. Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

b. Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani

3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Wawasan

Sub Kegiatan :

a. Pembentukan dan penguatan kelembagaan Koorporasi Petani

- **UPT PRODUKSI BENIH PERKEBUNAN**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

a. Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan

- **UPT PRODUKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI TANAMAN PERKEBUNAN**

A. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

1. Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman

Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih

Faktor ketidakseusaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan RKPD disebabkan antara lain:

- Program dan Kegiatan dirumuskan dengan anggaran yang tidak realistis atau tidak efisien dalam penggunaannya, maka ini bisa menunjukkan ketidaksesuaian dengan RKPD yang mengharuskan alokasi anggaran yang efisien dan efektif
- Program dan Kegiatan harus mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RKPD
- Program dan Kegiatan yang dirumuskan tidak mencerminkan pembagian sumber daya yang sesuai dengan prioritas RKPD

- Program dan Kegiatan tidak memiliki indikator kinerja yang relevan untuk mengukur pencapaian tujuan.

Ketidaksesuaian dalam rumusan kegiatan dengan RKPD dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan daerah. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dirumuskan sesuai dengan RKPD

Dengan perhatian yang cermat terhadap detail-detail ini, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih sesuai dengan RKPD dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Adapun rincian rencana kegiatan tiap program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perkebunan antara Dinas Perkebunan Provinsi Riau dengan Kabupaten / Kota Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel.6 (T-C.33).

TABEL 6 (T-C.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN ANTARA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU DAN KABUPATEN / KOTA TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

Kode						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						3	*4*		*8*	*9*	*10*	*14*		*15*
3	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**		**100 Persen**	**24,141,476,532**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**		100 Persen	**26,191,726,792**
3	27	01	1			Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14 Dokumen	165,000,000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		14 Dokumen	250,000,000
3	27	01	1	1	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah		14 Dokumen	165,000,000	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		14 Dokumen	250,000,000
3	**27**	**01**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)		*103 Orang*	*17,052,660,759*	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		103 Orang	*19,636,737,292*
3	27	01	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)		103 Orang/Bulan	17,052,660,759	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		103 Orang/Bulan	19,636,737,292
3	**27**	**01**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)		*7 Laporan*	*70,801,500*	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**		7 Laporan	*70,801,500*
3	27	01	1	3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)		7 Laporan	70,801,500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		7 Laporan	70,801,500
3	**27**	**01**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kehadiran ASN		*100 persen*	*72,100,000*	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		100 persen	*130,438,000*
3	27	01	1	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan		103	72,100,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		103	130,438,000
3	**27**	**01**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi		*5 Jenis*	*3,022,551,059*	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		5 Jenis	*1,700,000,000*
3	27	01	1	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		15 Paket	266,907,500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		15 Paket	224,246,378
3	27	01	1	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		29 Paket	679,485,858	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		29 Paket	500,000,000
3	27	01	1	6	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		3 Paket	302,293,335	Penyediaan bahan logistik kantor		3 Paket	150,000,000
3	27	01	1	6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		28 Paket	169,355,183	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		28 Paket	125,000,000
3	27	01	1	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260 Laporan	1,604,509,183	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		260 Laporan	700,753,622
3	**27**	**01**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan		*28 Unit*	*347,300,000*	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		28 Unit	*830,000,000*
3	27	01	1	7	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		28 Unit	347,300,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		28 Unit	830,000,000
3	**27**	**01**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah		*3 Laporan*	*2,523,034,829*	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		3 Laporan	*2,663,750,000*
3	27	01	1	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	13,750,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1 Laporan	13,750,000
3	27	01	1	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	489,280,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12 Laporan	450,000,000
3	27	01	1	8	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		924 Laporan	2,020,004,829	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor		924 Laporan	2,200,000,000
3	**27**	**01**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara		*35 Unit*	*888,028,385*	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		35 Unit	*910,000,000*
3	27	01	1	9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		13 Unit	546,300,885	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		13 Unit	460,000,000

Kode						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						3	*4*		*8*	*9*	*10*	*14*		*15*
3	27	01	1	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		18 Unit	65,670,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		18 Unit	115,000,000
3	27	01	1	9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		7 Unit	276,057,500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		7 Unit	335,000,000
3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**		**11.256.369 Ton**	**7,771,105,394**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**		11.256.369 Ton	**7,898,307,080**
3	**27**	**02**	**1**			***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***	***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***		***75 Ha***	***1,861,188,254***	***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***		75 Ha	***2,083,307,080***
3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		0	0	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian		0	-
3	27	02	1	01	0003	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan		1 Laporan	1,461,188,254	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan		1 Laporan	1,583,307,080
3	27	02	1	01	0005	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan		1 Laporan	400,000,000	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan		1 Laporan	500,000,000
3	**27**	**02**	**1**	**02**		***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***	***Jumlah bibit perkebunan***		***147.750 Bibit***	***5,909,917,140***	***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***		147.750 Bibit	***5,815,000,000***
3	27	02	1	02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih		40.000 Sertifikat	150,000,000	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih		40.000 Sertifikat	165,000,000
3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		1 Laporan	3,067,917,140	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan		2 Laporan	3,200,000,000
3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga		1 Laporan	2,692,000,000	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)		1 Laporan	2,450,000,000
3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**		**12.79 Kg/ha**	**7,786,200,000**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**		12.79 Kg/ha	**7,031,054,844**
3	**27**	**03**	**1**	**01**		***Penataan Prasarana Pertanian***	***Jumlah luas kebun yang ditanam***		***550 Ha***	*7,786,200,000*	***Penataan Prasarana Pertanian***		550 Ha	***7,031,054,844***
3	27	03	1	01	0001	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian		1 Dokumen	100,000,000	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian		1 Dokumen	100,000,000
3	27	03	1	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		6 Dokumen	4,070,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani		6 Dokumen	3,300,000,000
3	27	03	1	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		6 Dokumen	2,006,200,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani		6 Dokumen	2,010,000,000
3	27	03	1	01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	1,460,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya		1 Laporan	1,471,054,844
3	27	03	1	01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya		1 Unit	50,000,000
3	27	03	1	01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan		200 Ha	100,000,000	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian		200 Ha	100,000,000
3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**		**0,40 Persen**	**879,999,940**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**		0,40 Persen	**880,000,000**

Kode						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025 (TAHUN RENCANA)				Catatan Penting	Prakiraan Maju 2026	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	SUMBER DANA		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
						3	*4*		*8*	*9*	*10*	*14*		*15*
3	**27**	**05**	**1**	**01**		***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***	***Luas lahan yang dikendalikan***		***100 Ha***	*879,999,940*	***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***		100 Ha	***880,000,000***
3	27	05	1	01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan		200 Ha	275,000,000	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		200 Ha	275,000,000
3	27	05	1	01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		50 Ha	604,999,940	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan		50 Ha	605,000,000
3	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**		**76,81 Persen**	**400,000,000**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**		76,81 Persen	**440,000,000**
3	27	06	1	01		***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***		***13 perusahaan***	400,000,000	***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***		13 perusahaan	***440,000,000***
3	27	06	1	01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		12 Laporan	400,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian		12 Laporan	440,000,000
3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**		**2,34 Persen**	**798,733,231**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**		2,34 Persen	**1,130,000,000**
3	**27**	**07**	**1**			***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***		***80 Orang***	***224,999,885***	***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***		80 Orang	***225,000,000***
3	27	07	1	01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya		50 orang	224,999,885	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian		50 orang	225,000,000
3	27	07	1	01	02	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi		-	-	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian		-	-
3	27	07	1	02		***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***		*2 Kelompok*	*414,999,876*	***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***		2 Kelompok	*415,000,000*
3	27	07	1	02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		1 Dokumen	164,999,876	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian		1 Dokumen	165,000,000
3	27	07	1	02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan		6 kelompok	250,000,000	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani		6 kelompok	250,000,000
3	**27**	**07**	**1**	**03**		***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***	***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***		***2 Unit***	*158,733,470*	***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***		2 Unit	***490,000,000***
3	27	07	1	03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi		2 Unit	158,733,470	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani		2 Unit	490,000,000
										41,777,515,097				**43,571,088,716**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025 sesuai Renstra memiliki total anggaran sebesar Rp 41.777.515.097,- (Empat Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 yang terdiri atas :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 24.141.476.532,- (Dua Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Satu Juta Empat ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah)

b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian sebesar Rp. 4.929.105.394 ; (Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)

c. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian sebesar Rp. 7.786.200.000 ,- (Tujuh Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian sebesar Rp. 879.999.940,- (Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Rupiah)

e. Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp. 400,000,000 (Empat Ratus Juta Rupiah)

f. Program Penyuluhan Pertanian sebesar Rp. 798.733.231; (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah)

Sedangkan Rencana Kerja UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan terdapat pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 2.692.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah), dan UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah). Adapun rincian anggaran untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah terinput pada apikasi SIPD Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 7 berikut :

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERKEBUNAN						**38.935.515.097,00**							**40.956.088.716,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**38.935.515.097,00**							**40.956.088.716,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**38.935.515.097,00**							**40.956.088.716,00**	
1.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	***Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan***	**100 Persen**			**100 Persen**	**24.141.476.532,00**						**100 Persen**	**26.191.726.792,00**	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	28 Dokumen			14 Dokumen	165.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	14 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen			14 Dokumen	165.000.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	14 Dokumen	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi*	206 Orang			103 Orang	17.052.660.759,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	103 Orang	19.636.737.292,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	206 Orang/ Bulan			103 Orang/ Bulan	17.052.660.759,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	103 Orang/ Bulan	19.636.737.292,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola*	14 Laporan			7 Laporan	70.801.500,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Laporan	70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan			7 Laporan	70.801.500,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Laporan	70.801.500,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat Kehadiran ASN*	308 Paket			100 Persen	72.100.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	154 Paket	130.438.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	308 Paket			103 Paket	72.100.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	ASN Dinas Perkebunan Provinsi Riau	154 Paket	130.438.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi*	10 Jenis			5 Jenis	3.022.551.059,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	5 Jenis	1.700.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket			15 Paket	266.907.500,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	15 Paket	224.246.378,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	58 Paket			29 Paket	679.485.858,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	29 Paket	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket			3 Paket	302.293.335,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	3 Paket	150.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	56 Paket			28 Paket	169.355.183,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Paket	125.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan			260 Laporan	1.604.509.183,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	125 Laporan	700.753.622,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan*	56 Unit			28 Unit	347.300.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Unit	830.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	56 Unit			28 Unit	347.300.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	28 Unit	830.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa, Penyediaan Jasa, Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	6 Laporan			3 Laporan	2.523.034.829,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	3 Laporan	2.663.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan			1 Laporan	13.750.000,00	Kota Pekanbaru, Sukajadi, Jadirejo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	1 Laporan	13.750.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan			12 Laporan	489.280.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	12 Laporan	450.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1848 Laporan			924 Laporan	2.020.004.829,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	924 Laporan	2.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipelihara*	70 Unit			35 Unit	888.028.385,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	35 Unit	910.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit			13 Unit	546.300.885,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	13 Unit	460.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit			18 Unit	65.670.000,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	15 Unit	115.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit			7 Unit	276.057.500,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola	Dinas Perkebunan Provinsi Riau	7 Unit	335.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
2.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan***	**11.256.369 Ton**			**11.256.369 Ton**	**4.929.105.394,00**						**11.256.369 Ton**	**5.283.307.080,00**	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	*Luas Lahan yang di Fasilitasi (Pupuk, Pestisida dan Alsintan)*	150 Laporan 150 Ha			75 Ha	1.861.188.254,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	75 Laporan 75 Ha	2.083.307.080,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	2 laporan			1 laporan	1.461.188.254,00	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Mandau, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Bathin Solapan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, XIII Koto Kampar, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kuok, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Dumai Barat, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Sungai Sembilan, Semua Kel/Desa Kota Dumai, Medang Kampai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	1 laporan	1.583.307.080,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	2 laporan			1 laporan	400.000.000,00	Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun dan Pengecer Pupuk Bersubsidi	1 laporan	500.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah Bibit Perkebunan*	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	3.067.917.140,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun Komoditi Perkebunan	147750 Bibit 147.750 bibit	3.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	4 laporan			1 laporan	3.067.917.140,00	Kab. Bengkalis, Bantan, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kampar, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Kuantan Tengah, Semua Kel/Desa Kab. Rokan Hilir, Bangko, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun Komoditi Perkebunan	2 laporan	3.200.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
3.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Perkebunan***	**12,79 Kg/Ha**			**12,79 Kg/Ha**	**7.786.200.000,00**						**12,79 Kg/Ha**	**7.031.054.844,00**	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian	*Jumlah Luas Kebun yang Ditanam*	1100 Ha 1.100 Ha			550 Ha	7.786.200.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	550 Ha 550 Ha	7.031.054.844,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen			1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	1 Dokumen	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	16 Dokumen			6 Dokumen	4.070.000.000,00	Kab. Kuantan Singingi, Cerenti, Koto Cerenti Kab. Kuantan Singingi, Sentajo Raya, Beringin Jaya Kab. Rokan Hulu, Rambah, Menaming	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	8 Dokumen	3.300.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	12 Dokumen			6 Dokumen	2.006.200.000,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Bengkalis, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan Hulu, Semua Kel/Desa Kab. Kepulauan Meranti, Tebing Tinggi Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	6 Dokumen	2.010.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	6 Laporan			1 Laporan	1.460.000.000,00	Kab. Bengkalis, Rupat, Terkul Kab. Bengkalis, Siak Kecil, Muara Dua Kab. Bengkalis, Pinggir, Muara Basung Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Pekan Arba Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Seberang Tembilahan Kab. Indragiri Hulu, Pasir Penyu, Semua Kel/Desa Kab. Kampar, Kampar, Tanjung Rambutan Kab. Kampar, Rumbio Jaya, Simpang Petai Kab. Kuantan Singingi, Benai, Semua Kel/Desa Kab. Kuantan Singingi, Pangean, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	3 Laporan	1.471.054.844,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya														
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	2 Unit			1 Unit	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	1 Unit	50.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	400 Ha			200 Ha	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	200 Ha	100.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase Luas Penanganan Lahan Perkebunan Yang Terdampak Bencana***	**0,40 Persen**			**0,40 Persen**	**879.999.940,00**						**0,40 Persen**	**880.000.000,00**	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	*Luas Lahan yang di Kendalikan*	200 Ha 200 Ha			100 Ha	879.999.940,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	100 Ha 100 Ha	880.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	400 Ha			200 Ha	275.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	200 Ha	275.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	100 Ha			50 Ha	604.999.940,00	Kab. Bengkalis, Bengkalis, Kelemantan Barat Kab. Indragiri Hulu, Rengat, Sekip Hilir Kab. Pelalawan, Pangkalan Lesung, Tanjung Kuyo Kota Dumai, Sungai Sembilan, Bangsal Aceh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Komoditi Perkebunan	50 Ha	605.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
5.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	***Persentase Usaha Perkebunan Yang Memiliki Izin***	**76,81 Persen**			**76,81 Persen**	**400.000.000,00**						**76,81 Persen**	**440.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi Penerapan Izin Usaha Perkebunan*	26 Perusahaan 26 Perusahaan			13 Perusahaan	400.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Perusahaan Perkebunan	13 Perusahaan 13 Perusahaan	440.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	26 Laporan			12 Laporan	400.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Perusahaan Perkebunan	13 Laporan	440.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
6.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase SDM Yang Ditingkatkan Kompetensinya***	**2,34 Persen**			**2,34 Persen**	**798.733.231,00**						**2,34 Persen**	**1.130.000.000,00**	
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan Kompetensinya*	160 Orang 160 Orang			80 Orang	224.999.885,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	80 Orang 80 Orang	225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.01.0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
			Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	150 Orang			50 Orang	224.999.885,00	Kota Pekanbaru, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	75 Orang	225.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi*	4 Kelompok 4 Kelompok Tani			2 Kelompok	414.999.876,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	2 Kelompok 2 Kelompok Tani	415.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	1 Dokumen			1 Dokumen	164.999.876,00	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	1 Dokumen	165.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani														
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	24 Kelompok			6 Kelompok	250.000.000,00	Kab. Kepulauan Meranti, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkalis, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Indragiri Hilir, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penyuluh	12 Kelompok	250.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	*Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen*	4 Koorporasi 4 Unit			2 Unit	158.733.470,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Kopi, Petani Karet, Petani Sawit	2 Koorporasi 2 Unit	490.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
	3.27.07.1.03.0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	4 Unit			2 Unit	158.733.470,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Kopi, Petani Karet, Petani Sawit	2 Unit	490.000.000,00	DINAS PERKEBUNAN
		UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN						**2.692.000.000,00**							**2.450.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.692.000.000,00**							**2.450.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.692.000.000,00**							**2.450.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan***	**11.256.369 Ton**			**11.256.369 Ton**	**2.692.000.000,00**						**11.256.369 Ton**	**2.450.000.000,00**	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah Bibit Perkebunan*	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	2.692.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	147750 Bibit 147.750 bibit	2.450.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan														
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	4 laporan			1 laporan	2.692.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani Pekebun	2 laporan	2.450.000.000,00	UPT. PRODUKSI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN
		UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN						**150.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**150.000.000,00**							**165.000.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**150.000.000,00**							**165.000.000,00**	
1.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Jumlah Produksi Komoditas Utama Perkebunan***	**11.256.369 Ton**			**11.256.369 Ton**	**150.000.000,00**						**11.256.369 Ton**	**165.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	*Jumlah Bibit Perkebunan*	295500 Bibit 295.500 bibit			147.750 bibit	150.000.000,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penangkar Benih Komoditi Perkebunan	147750 Bibit 147.750 bibit	165.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih														
			Jumlah Sertifikat Benih	80.000 Sertifikat			40.000 Sertifikat	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Penguatan Ekonomi	Petani dan Penangkar Benih Komoditi Perkebunan	40.000 Sertifikat	165.000.000,00	UPT. PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN
	J U M L A H							**41.777.515.097,00**							**43.571.088.716,00**	

BAB V PENUTUP

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan pembangunan perkebunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan tahunan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Riau tahun 2025-2026 dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas kinerja pembangunan perkebunan di Provinsi Riau.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) dilakukan dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dalam satu program maupun antar program yang ditetapkan, serta memperhatikan keselarasan program pemerintah pusat melalui kementerian terkait dengan menghimpun usulan dari kabupaten/kota di dalam proses perencanaan pembangunan perkebunan. Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanan program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah dilalui tahapan dan mekanisme perencanaan tingkat daerah seperti Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Perkebunan, Forum Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan tahapan Musrenbang Daerah tahun 2024 guna merumuskan perencanaan tahun 2025.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 menjadi sangat penting artinya untuk menjadi acuan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggungjawab dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen Renja ini mengikat secara kelembagaan sebagai dokumen perencanaan dalam pelaksanaan program kegiatan pada tahun 2025 yang berpedoman dan tidak terlepas dari dokumen Renstra, RKPD, RPJMD dan RPJPD.

Yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perkebunan Provinsi Riau yang merupakan permasalahan yang terjadi antara lain :

1. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena banyaknya tanaman tua rusak, penggunaan bahan tanaman yang tidak bermutu dan bersertifikat, pemupukan yang tidak sesuai rekomendasi, penanganan pasca panen yang belum memadai serta lemahnya kelembagaan petani.

2. Terbatasnya infrastruktur untuk mendukung pemasaran seperti jalan produksi serta terbatasnya akses permodalan petani.

3. Rendahnya produksi tanaman perkebunan karena penggunaan bahan tanaman (benih) yang tidak bermutu / unggul, gangguan hama penyakit, anomaly cuaca, kebakaran lahan dan kebun serta banjir.

4. Mutu produk tanaman perkebunan yang masih rendah (belum memenuhi standar) dan harga produk tanaman perkebunan yang masih rendah pada tingkat petani.

5. Rendahnya harga komoditi perkebunan terutama karet dan kelapa yang diterima petani disebabkan karena panjangnya mata rantai perdagangan dengan sistem ijon dan tengkulak serta belum adanya register Pedagang pengumpul / pembeli Bokar (Karet) oleh Dinas Disperindag Kabupaten/Kota sebagaimana Permendag no 53 Tahun 2009.

6. Masih banyaknya pelaku usaha perkebunan yang belum memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan atau sudah memiliki IUP tapi belum memiliki HGU.

7. Kurangnya jaminan kepastian usaha perkebunan karena masalah RTRW yang belum terselesaikan.

8. Terbatasnya persediaan benih unggul bersertifikat tanaman perkebunan pada sumber bibit, sedangkan permintaan benih unggul berkualitas tidak hanya dari Provinsi Riau juga Provinsi lainnya.

Kaidah-kaidah pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 yang dilaksanakan antara lain :

1. Renja Dinas Perkebunan Provinsi Riau adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan perkebunan yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025.

2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 ini untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Bidang /UPT lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Riau dalam melaksanaan pembangunan perkebunan sesuai dengan program/kegiatan Tahun 2024 ini dengan sebaik–baiknya.

4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025, Dinas Perkebunan berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan

Sedangkan rencana tindak lanjut Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025 yang dilaksanakan antara lain

1. Meningkatkan produktivitas perkebunan melalui upaya peremajaan, rehabilitasi dan diversifikasi tanaman perkebunan, rekomendasi pemupukan, memperkuat kelembagaan petani serta meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan petani.

2. Membuka akses bagi pemasaran hasil produksi perkebunan dengan membangun jalan produksi

3. Meningkatkan produksi tanaman perkebunan dengan menggunakan bahan tanaman (benih) unggul bersertifikat, penggunaan lahan yang optimal (jumlah tanaman per Ha), pengendalian hama dan penyakit tanaman perkebunan, penggunaan pupuk yang tepat, perbaikan saluran drainase serta mengantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan kebun serta gangguan bencana alam lainnya.

4. Meningkatkan mutu produk perkebunan dengan memberikan bimbingan teknis pengolahan, sosialisasi peraturan tentang mutu produk perkebunan dan pemberian bantuan alat pengolahan. Dengan meningkatnya mutu produk perkebunan maka diharapkan harga yang diterima petani pun meningkat sehingga menambah pendapatan petani.

5. Memutus mata rantai pedagang tengkulak / ijon dan Dinas Perindag Kabupaten/Kota melakukan register terhadap pedagang pengumpul / pembeli karet (Bahan Olahan Karet (Bokar) petani
6. Peningkatan upaya penertiban perizinan perkebunan serta pembinaan dan monitoring pelaku usaha perkebunan
7. Percepatan penyelesaian Perubahan RTRW Propinsi Riau
8. Promosi untuk menarik minat investor membangun industri hilir perkebunan di Provinsi Riau
9. Meningkatkan kemampuan, ketrampilan dan wawasan SDM perkebunan melalui pendidikan dan latihan, kursus kursus teknis fungsional, magang dan lain-lain secara terprogram dan berkesinambungan.
10. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak perbankan dan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota agar memperoleh jalan keluar yang terbaik untuk memenuhi persyaratan memperoleh kredit permodalan pembangunan /peremajaan kebun program revitalisasi.
11. Membangun kebun sumber benih tanaman perkebunan pada setiap daerah pengembangan tanaman perkebunan

Rencana Kerja tahun 2025 ini juga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana secara berkesinambungan oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perkebunan Provinsi Riau sehingga akan diperoleh pencapaian target program dan kegiatan sebagai upaya peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Dalam rangka sinergitas perencanaan pembangunan perkebunan harus dilakukan lebih intensif di dalam koordinasi antar instansi yang terkait agar hasil pembangunan yang dilaksanakan bermanfaat bagi petani juga memberikan manfaat untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kompetitif. Selanjutnya, agar masyarakat turut berperan aktif dalam pelaksanaan perencanaan yang telah disusun secara bersama, maka proses perencanaan dilakukan dengan menghimpun usulan dan masukan dari masyarakat Provinsi Riau secara bertahap dan berjenjang.

Pekanbaru, 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

DR. SYAHRIAL ABDI,AP,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PERKEBUNAN

Jl. Cut Nyak Dien No.6 Telp/Fax (0761) 47153

PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 100.3.3/DISBUN-1/2024/358

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

Menimbang:

a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 137 peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah serta sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau tentang Pembentukan Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau;

Mengingat :

1. Undang undang No. 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 No.112);
2. Undang undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-20025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritnah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemeritnah Daerah dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4737);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4817);

8. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI tahun 2018 nomor 2, Tambahan lembaran negara RI Nomor 6178);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2019 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 89, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2017 Nomor 12) ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);

14. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42);

15. Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;

16. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau;

17. Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025-2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) TAHUN 2025 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

PERTAMA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau ini.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memilik tugas dan tanggung jawab untuk menyusun Dokumen Perencanaan (RENJA PD) Dinas Perkebunan Provinsi Riau Tahun 2025

KETIGA : Tim Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2025 Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, Februari 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

Dr. SYAHRIAL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

Tembusan:

1. Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
3. Kepala Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau
Nomor : 100.3.3/DISBUN-1/2024/358
Tanggal :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA PD) TAHUN 2025
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

NO.	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS	KETUA
2.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua
3.	Ketua Tim Substansi Perencana	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Produksi	Anggota
5.	Kepala Bidang Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan	Anggota
8.	Kepala UPT Produksi Benih Tanaman Perkebunan	Anggota
9.	Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan	Anggota
10.	Fungsional Perencana	Anggota

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, Februari 2024

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PERKEBUNAN

Dr. SYAHRIAL ABDI, A.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19751001 199503 1 001

LAMPIRAN 1

SANDINGAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN RENSTRA 2025-2026 DENGAN

RENJA TAHUN 2025 (INPUTAN https://sipd-ri.kemendagri.go.id)

Perangkat Daerah : Dinas Perkebunan

No	Tujuan	Sasaran	Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	RENSTRA TAHUN 2025-2026						Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	RENCANA KERJA TAHUN 2025	
													Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
													Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah												Target 2025	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											Target	Rp
	6. Mewujudkan Perekonomian yang Mandiri dan berdaya saing	Meningkatkan kemandirian ekoonomi dan emnurunkan kesenjangan pendapatan	**3**	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**	**Persen**	**23,815,074,383**	**100**	**25,581,886,075**	100	**26,191,726,792**	**100**	**51,773,612,866.89**	**3**	**27**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan**	**Persen**		**100**	**26,269,249,120**
			3	27	01	1			**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen	-	14	250,000,000.00	14	250,000,000	28	500,000,000.00	3	27	01	1			**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		14	150,000,000
			3	27	01	1	1	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	-	14	150,000,000.00	14	250,000,000	28	400,000,000.00	3	27	01	1	1	0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokunen perencanaan perangkat daerah	Dokumen		14	150,000,000
			3	**27**	**01**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)	Orang	18,389,590,018	*103*	19,130,433,347.00	103	19,636,737,292	*103*	38,767,170,639.00	**3**	**27**	**01**	**1**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi (Laporan)	Orang		*103*	*19,130,433,347*
			3	27	01	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Orang/bulan	18,389,590,018	103	19,130,433,347.00	103	19,636,737,292	103	38,767,170,639.00	3	27	01	1	2	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	Orang/bulan		103	19,130,433,347
			3	**27**	**01**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	Laporan	*64,365,000*	*7*	*70,801,500.00*	7	*70,801,500*	*14*	141,603,000.00	**3**	**27**	**01**	**1**	**3**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dikelola (Laporan)	Laporan		*7*	*70,801,500*
			3	27	01	1	3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan	64,365,000	7	70,801,500.00	7	70,801,500	14	141,603,000.00	3	27	01	1	3	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Laporan		7	70,801,500
			3	**27**	**01**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	Persen	*107,800,000*	*100*	*118,580,000.00*	100	*130,438,000*	*200*	249,018,000.00	**3**	**27**	**01**	**1**	**5**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Tingkat Kehadiran ASN	Persen		*100*	*72,100,000*
			3	27	01	1	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	107,800,000	154	118,580,000.00	154	130,438,000	308	249,018,000.00	3	27	01	1	5	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		154	72,100,000
			3	**27**	**01**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	Jenis		*5*	*1,651,808,955*	5	*1,700,000,000*	*10*	3,351,808,954.95	**3**	**27**	**01**	**1**	**6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah jenis layanan adminitrasi umum yang dipenuhi	Jenis		*5*	*2,642,646,974*
			3	27	01	1	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	185,327,442	15	203,860,344	15	224,246,378	15	428,106,721.35	3	27	01	1	6	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		15	190,181,873
			3	27	01	1	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	357,805,200	29	495,000,000.00	29	500,000,000	58	995,000,000.00	3	27	01	1	6	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		29	448,562,600

No	Tujuan	Sasaran	Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
													Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah												Target 2025	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											Target	Rp
			3	27	01	1	6	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	128,999,965	3	149,895,709	3	150,000,000	6	299,895,708.60	3	27	01	1	6	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		3	290,193,695
			3	27	01	1	6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	93,562,764	28	125,000,000.00	28	125,000,000	56	250,000,000.00	3	27	01	1	6	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		28	109,199,623
			3	27	01	1	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	597,410,710	125	678,052,903.00	125	700,753,622	250	1,378,806,525.00	3	27	01	1	6	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		125	1,604,509,183
			3	**27**	**01**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit	*652,776,723*	*28*	*827,410,647.00*	28	*830,000,000*	56	1,657,410,647.00	**3**	**27**	**01**	**1**	**7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Unit		*28*	*623,738,014*
			3	27	01	1	7	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	652,776,723	28	827,410,647.00	28	830,000,000	56	1,657,410,647.00	3	27	01	1	7	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		28	623,738,014
			3	**27**	**01**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan	*2,568,901,822*	*3*	*2,627,793,126.00*	3	*2,663,750,000*	6	5,291,543,126.20	**3**	**27**	**01**	**1**	**8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan pengelolaan jasa, penyediaan jasa,penunjang urusan pemerintah daerah	Laporan		*3*	*2,735,860,785*
			3	27	01	1	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12,500,000	1	13,750,000.00	1	13,750,000	2	27,500,000.00	3	27	01	1	8	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	13,750,000
			3	27	01	1	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	485,619,124	12	446,182,000.00	12	450,000,000	24	896,182,000.00	3	27	01	1	8	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	456,905,956
			3	27	01	1	8	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2,070,782,698	924	2,167,861,126.00	924	2,200,000,000	1848	4,367,861,126.20	3	27	01	1	8	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		924	2,265,204,829
			3	**27**	**01**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit	*668,234,739*	*35*	*905,058,500.00*	35	*910,000,000*	70	1,815,058,500.00	**3**	**27**	**01**	**1**	**9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		*35*	*843,668,500*
			3	27	01	1	9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	317,610,000	13	459,371,000.00	13	460,000,000	26	919,371,000.00	3	27	01	1	9	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit		13	486,091,000
			3	27	01	1	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	50,000,000	15	115,000,000.00	15	115,000,000	30	230,000,000.00	3	27	01	1	9	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		18	90,670,000
			3	27	01	1	9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		300,624,739	7	330,687,500.00	7	335,000,000	14	665,687,500.00	3	27	01	1	9	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			7	266,907,500

No	Tujuan	Sasaran	Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
													Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah												Target 2025	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											Target	Rp
			3	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**		**1,992,922,835**	**11,256,369**	**7,878,355,394**	11256369	**8,163,307,080**	**22,512,738**	16,041,662,474.00	**3**	**27**	**02**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah produksi komoditas utama perkebunan**			**11,256,369**	**7,521,105,394**
			3	**27**	**02**	**1**			***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***	***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***	***Ha***		***75***	***2,026,188,254***	75	**2,248,307,080**	150	4,274,495,334.00	**3**	**27**	**02**	**1**			***Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian***	***Luas lahan yang difasilitasi (pupuk, pestisida dan alsintan)***	***Ha***		***75***	***1,861,188,254***
			3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	-	1	165,000,000	1	165,000,000	2	330,000,000.00	3	27	02	1	01	01	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan		-	-
			3	27	02	1	01	0003	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Laporan	-	1	1,461,188,254	1	1,583,307,080	2	3,044,495,334.00	3	27	02	1	01	0003	Pengawasan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pasca panen perkebunan	Laporan		1	1,461,188,254
			3	27	02	1	01	0005	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan	Laporan	-	1	400,000,000	1	500,000,000	2	900,000,000.00	3	27	02	1	01	0005	Pengawasan sebaran sarana pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengoalahan hasil perkebunan	Laporan		1	400,000,000
			3	**27**	**02**	**1**	**02**		***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***	***Jumlah bibit perkebunan***	***Bibit***	***1,992,922,835***	***147,750***	***5,852,167,140***	147,750	***5,915,000,000***	**295,500**	11,767,167,140.00	**3**	**27**	**02**	**1**	**02**		***Pengawasan Mutu, Penyediaan Dan Peredaran Benih Tanaman***	***Jumlah bibit perkebunan***	***Bibit***		***147,750***	***5,659,917,140***
			3	27	02	1	02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat	92,871,860	40,000	249,999,999.87	40000	265,000,000	80,000	514,999,999.87	3	27	02	1	02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat		40	150,000,000
			3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	Laporan	1,314,528,750	1	3,160,167,140.13	1	3,200,000,000	2	6,360,167,140.13	3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai	Laporan		1	3,067,917,140
			3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan	Laporan	585,522,225	1	2,442,000,000	1	2,450,000,000	2	4,892,000,000.00	3	27	02	1	02	0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura dan Perkebunan, Tanaman Pangan, dan Perkebunan (UPT)	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan seusai	Laporan		1	2,442,000,000
			3	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**Kg/Ha**	**1,316,901,584**	**12.79**	**6,886,200,000**	12.79	**6,931,054,844**	26	13,817,254,844	**3**	**27**	**03**				**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah produktivitas komoditas utama perkebunan**	**Kg/ha**		**12.79**	**6,986,200,000**
			3	**27**	**03**	**1**	**01**		***Penataan Prasarana Pertanian***	***Jumlah luas kebun yang ditanam***	***Ha***	*1,316,901,584*	***550***	*6,886,200,000*	550	***6,931,054,844***	1100	13,817,254,844	**3**	**27**	**03**	**1**	**01**		***Penataan Prasarana Pertanian***	***Jumlah luas kebun yang ditanam***	***Ha***		***550***	*6,986,200,000*
			3	27	03	1	01	0001	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Dokumen		1	100,000,000	1	100,000,000	2	200,000,000	3	27	03	1	01	0001	Perencanaan, Pengembangan, Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah rencana pengembangan prasarana, kawasan dan komoditas pertanian	Dokumen		1	100,000,000
			3	27	03	1	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen	-	8	3,170,000,000	8	3,200,000,000	16	6,370,000,000	3	27	03	1	01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen		8	3,270,000,000

No	Tujuan	Sasaran	Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
													Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah												Target 2025	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											Target	Rp
			3	27	03	1	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen	419,004,910	6	2,006,200,000	6	2,010,000,000	12	4,016,200,000	3	27	03	1	01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen		6	2,006,200,000
			3	27	03	1	01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	897,896,674	3	1,460,000,000	3	1,471,054,844	6	2,931,054,844	3	27	03	1	01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan		1	1,460,000,000
			3	27	03	1	01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit	-	1	50,000,000	1	50,000,000	2	100,000,000	3	27	03	1	01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit		1	50,000,000
			3	27	03	1	01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	-	200	100,000,000	200	100,000,000	400	200,000,000	3	27	03	1	01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha		200	100,000,000
			3	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**Persen**	**105,999,751**	**0.4**	**880,000,000**	0.40	**880,000,000**	1	1,760,000,000	**3**	**27**	**05**				**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Luas penanganan lahan perkebunan yang terdampak bencana**	**Persen**		**0.4**	**879,999,940**
			3	***27***	***05***	***1***	***01***		***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***	***Luas lahan yang dikendalikan***		*105,999,751*	***100***	*880,000,000*	100	***880,000,000***	200	1,760,000,000	***3***	***27***	***05***	***1***	***01***		***Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi***	***Luas lahan yang dikendalikan***			***100***	*879,999,940*
			3	27	05	1	01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	105,999,751	200	275,000,000	200	275,000,000	400	550,000,000	3	27	05	1	01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha		200	275,000,000
			3	27	05	1	01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha	-	-	605,000,000	0	605,000,000	0	1,210,000,000	3	27	05	1	01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha		50	604,999,940
			3	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**Persen**	**349,999,855**	**76.81**	**400,000,000**	**76.81**	**440,000,000**	**79.81**	**840,000,000**	**3**	**27**	**06**				**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase usaha perkebunan yang memiliki izin**	**Persen**		**76,81**	**400,000,000**
			3	27	06	1	01		***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***	***Perusahaan***	**349,999,855**	***13***	**400,000,000**	13	***440,000,000***	26	840,000,000	3	27	06	1	01		***Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota***	***Jumlah perusahaan yang dibina dan diawasi penerapan izin usaha perkebunan***	***Perusahaan***		***13***	400,000,000
			3	27	06	1	01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	349,999,855	13	400,000,000	13	440,000,000	26	840,000,000	3	27	06	1	01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan		12	400,000,000
			3	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**Persen**	**197,543,418**	**2,34**	**1,228,846,216**	3	**1,230,000,000**	3	2,458,846,216	**3**	**27**	**07**				**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase SDM yang ditingkatkan kompetensinya**	**Persen**		**2,34**	**798,733,231**
			3	***27***	***07***	***1***			***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***	***Orang***	***49,719,750***	***80***	***325,000,000***	80	***325,000,000***	160	650,000,000	***3***	***27***	***07***	***1***			***Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah penyuluh yang ditingkatkan kompetensinya***	***Orang***		***80***	***224,999,885***

No	Tujuan	Sasaran	Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kode						PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan	
													Target 2025		Target 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah												Target 2025	
													Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											Target	Rp
			3	27	07	1	01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	-	225	225,000,000	225	225,000,000	450	450,000,000	3	27	07	1	01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang		50	224,999,885
			3	27	07	1	01	02	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi		49,719,750	12	100,000,000	12	100,000,000	24	200,000,000	3	27	07	1	01	02	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta yang Telah mengikuti Pengembangan Kompetensi			-	-
			3	27	07	1	02		***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***	***Kelompok***	***55,131,028***	***2***	***415,000,000***	**2**	***415,000,000***	4	830,000,000	3	27	07	1	02		***Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian***	***Jumlah kelembagaan penyuluhan yang dibina dan diawasi***	***Kelompok***		*2*	*414,999,876*
			3	27	07	1	02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen	-	1	165,000,000	1	165,000,000	2	330,000,000	3	27	07	1	02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	***Dokumen***		1	164,999,876
			3	27	07	1	02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	kelompok	55,131,028	6	250,000,000	6	250,000,000	12	500,000,000	3	27	07	1	02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	***kelompok***		6	250,000,000
			3	**27**	**07**	**1**	**03**		***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***	***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***	***Unit***	*92,692,640*	***2***	*488,846,216*	2	***490,000,000***	4	978,846,216	**3**	**27**	**07**	**1**	**03**		***Pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan***	***Jumlah koorporasi yang mendapat pembinaan manajemen***	***Unit***		***2***	*158,733,470*
			3	27	07	1	03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	***Unit***	***92,692,640***	2	488,846,215.59	2	490,000,000	4	978,846,215.59	3	27	07	1	03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani	Jumlah Koorporasi Petani yang Dibentuk dan Beroperasi	***Unit***		2	158,733,470
												27,778,441,826		**42,855,287,685**		**43,836,088,716**		**86,691,376,400.48**												**42,855,287,685**

TABEL VERIFIKASI RENJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU

TAHUN 2025

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
			SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1.	**BAB I**	**PENDAHULUAN**			
	1.1. Latar Belakang	Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD	✓		
	1.2 Dasar Hukum	Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.		✓	- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
					- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5); - Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 22).
	1.3 Maksud dan Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.	✓		
	1.4 Sistematika Penulisan	Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.	✓		
2.	**BAB II**	**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**		✓	- Ganti judul tahun 2023 pada bab 2
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya,		✓	- Untuk narasi sajian pada table T.C. 29 dijelaskan target dan realisai di tahun 2023 - Perhatikan kembali pada table TC. 29 untuk kolom tahun n-1,n-2,n-3

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut; dan 7. Sajikan **Tabel T-C.29**			
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	1. Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK; 2. Sajikan **Tabel T-C.30**		✓	Perhatikan kembali pada table TC. 30 untuk kolom proyeksi , cek kembali di permendagri 86
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD; 3. Dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable Development Goals*); 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD; dan 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun yang direncanakan	✓		
	2.4 Review terhadap RKPD	Berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan			- Konfirmasi hasil analisis kebutuhan gaji pegawai pada table T-C 31 - Cek kembali table T-C 31 pada kolom RKPD, sesuaikan dengan RKPD

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat didalam RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Sajikan **Tabel T-C.31**			
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Masyarakat	Berisikan uraian mengenai : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan/sub kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah; 3. Sajikan Tabel **T-C.32**	✓		
3	**BAB III**	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**			
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Berisikan uraian mengenai : Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	✓		
	3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	Berisikan uraian mengenai : 1. Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah; 2. Target Indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada Renja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah.	✓		
	3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Berisikan uraian mengenai : 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan; 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan; 3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub		✓	- Belum menguraikan faktor-faktor terhadap rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan. - Berikan penjelasan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik program, kegiatan dan subkegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya

NO	BAB/SUBBAB	SUBSTANSI MATERI	HASIL VERIFIKASI		
		kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya dan 4. Sajikan Tabel **T-C.33**			
4	**BAB IV**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**			
		Berisikan uraian mengenai : Hasil inputan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan pada SIPD RI sesuaikan target indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan dengan RKPD	✓		
5	**BAB V**	**PENUTUP**			
		Berisikan uraian mengenai : 1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; 3. Rencana tindak lanjut; 4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan **tempat** dan **tanggal** dokumen, **nama Perangkat Daerah** dan **nama** dan **tanda tangan kepala Perangkat Daerah**, serta **cap** pemerintah daerah yang bersangkutan.	✓		
6	**LAMPIRAN**	1. Format pemetaan program/kegiatan/sub kegiatan renstra perangkat daerah tahun 2025-2026 dengan program/kegiatan/sub kegiatan SIPD-RI (Renja 2025) 2. SK Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025		✓	Lampirkan SK TIM

Pekanbaru, 2024

Dinas Perkebunan Provinsi Riau

Sekretaris,

SUPRIADI,S.Hut, MT
NIP. 19710806 199203 1 003

Mengetahui,
Kepala Bidang Perekonomian Dan Sumber Daya Alam

ABDUL MADIAN
NIP. 19750516 200212 1 006

Verifikator :

FUNGSIONAL PERENCANA AHLI MUDA

RIZKY RACHMAWATI
NIP. 19800331 200903 2 002

PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

SYARIFAH AMINAH
NIP. 19800719 200901 2 006